



# PEMANTAPAN EKONOMI DIGITAL GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL

**Drs. Suharyono Soemarwoto, M.M**

Staf Ahli Hubungan Industrial dan Logistik PT. Pertamina, Kemen BUMN RI  
(Alumnus PPRA 59 Lemhannas RI)

## **Abstrak**

Perubahan model bisnis dari *offline* ke *online* berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan *borderless* dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertanggungjawabkan ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan *e-commerce* secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (*Mobile Satelite System*) untuk memperluas jaringan konektivitas, mengembangkan *platform* nusantara.

**Kata kunci:** Ekonomi Digital, Ketahanan Nasional, e-Commerce



## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi berbasis internet berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital, seperti bisnis *online*, *startups*, *unicorn* dan lain-lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perubahan model bisnis dari *offline* ke *online* berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan *borderless* dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertanggung ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, masih dijumpai adanya kendala dan tantangan yang harus segera diatasi menyangkut regulasi yang mengatur transaksi digital, perpajakan, perlindungan konsumen, maupun permasalahan internasionalisasi (akuisisi perusahaan-perusahaan asing terhadap pelaku *startups*).<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat dengan penetrasi sekitar 54,68% (143,26 juta jiwa) terkoneksi internet

diproeksikan dapat meraih profit sekitar US\$ 1 Miliar. Percepatan perlu dilakukan mengingat jaringan internet belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akibat dari belum dimilikinya satelit serta saham perusahaan telekomunikasi dikuasai asing, sehingga menimbulkan kerawanan keamanan *big data* yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan bisnis mereka. Sementara itu, persoalan dan tantangan ekosistem digital ekonomi masih bekisar pada persoalan infrastruktur komunikasi, aplikasi dan *content*.<sup>2</sup>

Kondisi yang demikian akan sangat mempengaruhi terwujudnya kemandirian ekonomi maupun ketahanan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Pemantapan Ekonomi Digital dilakukan pemerintah guna meningkatkan ketahanan nasional?”

## PEMBAHASAN

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan Esai ini adalah deskripsitkualitatif yang menjelaskan variabel X (Pemantapan Ekonomi Digital),

Varibel Y (Peningkatan Ketahanan Nasional), dengan variable intervening/variabel antara (A) Kemandirian Bangsa.

a. **Pengertian-Pengertian.** Yang dimaksud dengan Ekonomi Digital menurut Don Tapscott dalam Meithianan Indrasari, adalah sosio politik dan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen yang meliputi informasi, akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Menurut Thomas Mesenbourg, ada 3 (tiga) komponen utama konsep Ekonomi Digital yaitu infrastruktur e-bisnis (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan internet, Sumber daya Manusia, dll), e-bisnis (bagaimana proses bisnis dilakukan melalui internet), dan e-commerce (transaksi bisnis dilakukan, misal transfer barang dalam bisnis online, dll.)<sup>3</sup>. Inti dari ekonomi digital adalah penggunaan komputer dalam semua aktivitas ekonomi dari proses produksi hingga distribusi kepada konsumen yang semakin berkembang menjadi dunia *e-everything* yang memiliki dampak positif maupun negatif sehingga perlu menyiapkan sarana pendukung maupun kesiapan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial.<sup>4</sup>

Kemandirian ekonomi menurut Adi Sasono adalah ekonomi yang melibatkan prakarsa rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat.<sup>5</sup>

Kemandirian ekonomi tidak tergantung ekonomi asing, mengutamakan kekuatan sumber daya domestik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menentang dominasi maupun penjajahan.<sup>6</sup> Sehingga diperlukan penguatan produksi, distribusi, jaringan dan konsumsi domestik menjadi prioritas membangun ekonomi rakyat. Menurut Sri Edi Swasono, kita tidak saja menghadapi *debt*

*trap* (jebakan utang) tetapi juga *culture trap* (jebakan budaya) dalam mentransformasikan ekonomi dan sosial untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berazas kebersamaan dan kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945.<sup>7</sup>

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletandan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.<sup>8</sup>

b. Analisis Permasalahan

Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Pemerintah harus menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital<sup>9</sup>. Juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi yaitu sifat keterbukaan sistem perekonomian, manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pamarasan, teknologi, struktur ekonomi, infrastruktur (sarana & prasarana), potnesi SDM, serta potensi dan pengelolaan dana.<sup>10</sup>

1) UU ITE belum cukup untuk mengatur ekonomi digital. Menurut Sylvia W. Sumarlin bahwa UU ITE belum cukup mengatur ekonomi digital sehingga perusahaan asing yang menikmati keuntungan dari kontribusi pasar di Indonesia yang mencapai lebih US\$ 150

juta/tahun, Indonesia tidak mendapatkan manfaat sedikitpun. UU ITE juga belum cukup untuk mengatasi penyalahgunaan IT untuk kepentingan yang tidak bertanggungjawab. Pemilik platform harus bertanggungjawab

secara hukum atas content-content negatif. Disisi lain, juga telah terjadi akuisisi *startups* (usaha rintisan) : Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka, oleh perusahaan-perusahaan asing.<sup>11</sup> Terkait e-commerce sebagai transaksi digital, Bank Indonesia telah melarang transaksi bitcoin karena peluang terhadap penipuan dan pencurian semacam *fraud virtual currency*. (Suharyono Soemarwoto dalam Kaltimpost, 16 Agustus 2018).<sup>12</sup>

- 2) Konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya.<sup>13</sup> Pengembangan jaringan melalui kable fiberoptik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negara-negara tetangga.
- 3) Lemahnya Cyber Security Nasional. Platform IT masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, termasuk menguasai saham BUMN PT. Telkom sehingga *cyber security* menjadi persoalan sangat serius dapat mengancam kepentingan nasional. Olehkarena itu, kita harus segera melakukan divestasi saham

100% untuk Indonesia. Dibarengi pembangunan MSS (*Mobile Satelite System*), platform IT sendiri, misal nusantara sebagai platform IT nasional pengganti google, facebook, twitter, yahoo, dan lain-lain di Indonesia.

- 4) Kendala Akses Keuangan Pelaku Ekonomi Digital. Pelaku ekonomi kreatif berbasis digital (internet) disamping terkendalaoleh konektivitas jaringan juga permasalahan keuangan. Mereka kesulitan m e n g a k s e s perbankan untuk mendapatkan modal kerja yang hanya puluhan juta rupiah, akibat dari regulasi yang belum berpihak kepadanya<sup>14</sup>. Kondisi ekonomi digital yang mulai tumbuh namun belum diikuti oleh keberpihakan negara maka mengakibatkan kerugian-kerugian baik menyangkut profitabilitas maupun keamanan terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu pemantapan melalui kehadiran negara untuk mengatur dana mendayagunakannya agar semakin mandiri mendukung ketahanan nasional sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan untuk mencapaicita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

c. Analisis antar gatra

Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ditinjau

dari gatra ekonomi bahwa ekonomi digital yang maju dan mandiri akan memberikan nilai tambah yang signifikan kepada gatra-gatra lainnya, yaitu gatra ideologi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (Mobile Satellite System) untuk memperluas jaringan konektivitas, mengembangkan platform nusantara sebagai pengganti google, facebook, twitter, yahoo maupun lainnya, mengembangkan cyber security yang mandiri agar mendukung ketahanan nasional yang tangguh guna menciptakan kondisi yang memungkinkan melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
- 2) Para pelaku ekonomi digital memerlukan akses keuangan yang mudah dan memadai sehingga diperlukan keberpihakan negara untuk mengembangkan ekosistem digital yang berbasis budaya nusantara.

### **b. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

- 1) Agar pemerintah melakukan penguatan ekonomi digital berupa pembangunan MSS (Mobile Satellite System), divestasi saham PT.Telkomsel (anak perusahaan BUMN Telkom) 100% untuk

Indonesia, mengembangkan platform nusantara sebagai pengganti platform asing.

- 2) Agar pemerintah bersama-sama DPR RI merevisi UU ITE yang pro-kepentingan nasional, sekaligus mengatur bisnis-bisnis asing untuk kepentingan bangsa dan NKRI serta mempermudah akses perbankan untuk para pelaku *startups*.

## **Endnotes**

1. <https://ekbis.sindonews.com/read/1374081/34/empat-perusahaan-startup-indonesia-kini-dikuasai-asing-1548642454> (diakses tanggal 23 Maret 2019, jam 17.11 wib)
2. <http://elsam.or.id/2019/02/mengurai-permasalahan-dan-tantangan-kebijakan-ekonomi-digital/> (diakses tanggal 21 Maret 2019, jam 11.34)
3. <http://repository.unitomo.ac.id/650/1/orasi%20ilmiah.pdf> (diakses tanggal 23 Maret 2019, jam 18.18 wib)
4. Tim Pokja Ekonomi, 2019, *Ekonomi 2019*, Jakarta, Lemhannas R.I. (hlm.101-104)
5. <http://binaswadaya.org/id/2014/02/27/perjuangkan-ekonomi-kerakyatan/> (diakses tanggal 24 Maret 2019, jam 07.01 wib)
6. [http://estella.mb.ipb.ac.id/pluginfile.php/62/mod\\_forum/attachment/1346/Kemandirian%20Ekonomi%20Diwujudkan%20Melalui%20Kedaulatan%20Pangan\\_REV300916%20%281%29.pdf](http://estella.mb.ipb.ac.id/pluginfile.php/62/mod_forum/attachment/1346/Kemandirian%20Ekonomi%20Diwujudkan%20Melalui%20Kedaulatan%20Pangan_REV300916%20%281%29.pdf) (diakses tanggal 24 maret 2019, jam 06.53)
7. [https://www.bappenas.go.id/files/4413/5027/3723/sri-edi\\_20091014142216\\_2288\\_0.doc](https://www.bappenas.go.id/files/4413/5027/3723/sri-edi_20091014142216_2288_0.doc) (diakses tanggal 23 maret 2019, jam 18.10 wib)
8. Tim Pokja Geostrategi dan Ketahanan



Nasional, 2019, *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Penerbit Lemhannas RI. (hlm.75-58).

9. <http://elsam.or.id/2019/02/mengurai-permasalahan-dan-tantangan-kebijakan-ekonomi-digital/> (diakses tanggal 21 Maret 2019, jam 11.34)
10. Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional, 2019, *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Lemhannas R.I, (hlm.100-105)
11. <https://ekbis.sindonews.com/read/1374081/34/empat-perusahaan-startup-indonesia-kini-dikuasai-asing-1548642454> (diakses tanggal 23 Maret 2019, jam 17.11 wib)
12. Kaltimpost, 16 Agustus 2019, Mewaspada sisi gelap uang digital oleh Suharyono Soemarwoto. (hlm.2)
13. Tim Pokja Geostrategi dan Ketahanan Nasional, 2019, *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Lemhannas R.I. (hlm.22-23).
14. Hasil Wawancara dengan Sylvia W.Sumarlin tanggal 21 Maret 2019 jam 19.00.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Traksaksi Elektronik*.
- Tim Pokja BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2019, *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*, Lemhannas Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Pokja Ekonomi, 2019, *Ekonomi 2019*, Jakarta, Lemhannas R.I.
- Kaltimpost*, 16 Agustus 2018, Laporan Utama : Mewaspada sisi gelap uang digital oleh Suharyono Soemarwoto, hlm.2.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1374081/34/empat-perusahaan-startup-indonesia-kini-dikuasai-asing-1548642454> (diakses tanggal 23 Maret 2019, jam 17.11 wib)

<http://elsam.or.id/2019/02/mengurai-permasalahan-dan-tantangan-kebijakan-ekonomi-digital/> (diakses tanggal 21 Maret 2019, jam 11.34)

<http://repository.unitomo.ac.id/650/1/orasi%20ilmiah.pdf> (diakses tanggal 23 Maret 2019, jam 18.18 wib)

<http://binaswadaya.org/id/2014/02/27/perjuangkan-ekonomi-kerakyatan/> (diakses tanggal 24 Maret 2019, jam 07.01 wib)

[http://estella.mb.ipb.ac.id/pluginfile.php/62/mod\\_forum/attachment/1346/Kemandirian%20Ekonomi%20Diwujudkan%20Melalui%20Kedaulatan%20Pangan\\_REV300916%20%281%29.pdf](http://estella.mb.ipb.ac.id/pluginfile.php/62/mod_forum/attachment/1346/Kemandirian%20Ekonomi%20Diwujudkan%20Melalui%20Kedaulatan%20Pangan_REV300916%20%281%29.pdf) (diakses tanggal 24 maret 2019, jam 06.53)

[https://www.bappenas.go.id/files/4413/5027/3723/sri-edi\\_20091014142216\\_\\_2288\\_\\_0.doc](https://www.bappenas.go.id/files/4413/5027/3723/sri-edi_20091014142216__2288__0.doc) (diakses tanggal 23 maret 2019, jam 18.10 wib)

Tim Pokja Geostrategi dan Ketahanan Nasional, 2019, *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Penerbit Lemhannas RI. (hlm.75-58).

<http://elsam.or.id/2019/02/mengurai-permasalahan-dan-tantangan-kebijakan-ekonomi-digital/> (diakses tanggal 21 Maret 2019, jam 11.34)

<https://ekbis.sindonews.com/read/1374081/34/empat-perusahaan-startup-indonesia-kini-dikuasai-asing-1548642454> (diakses tanggal 23 Maret 2019, jam 17.11 wib).